



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN LAPANGAN PANITIA KERJA**  
**MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS BKSAP DPR-RI**  
**KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TANGGAL 13 – 14 DESEMBER 2010**

\*

\* \*

\* \* \*

\* \* \* \*

\* \* \*

\* \*

\*

**JAKARTA, DESEMBER 2010**

# DAFTAR ISI

	HALAMAN	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang	2
	1.2. Dasar Kunjungan	4
	1.3. Maksud Dan Tujuan	4
	1.4. Susunan Delegasi	4
<b>BAB II</b>	<b>PROFIL NUSA TENGGARA TIMUR</b>	
	2.1. Umum	5
<b>BAB III</b>	<b>HASIL KUNJUNGAN</b>	
	3.1. Pertemuan Dengan Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya	9
	3.2. Pertemuan Dengan Bupati Kupang Ayub Titu Eki	13
	3.3. Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Tenau, NTT	14
	3.4. Kajian Pencapaian MDGs di NTT	15
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	4.1 Kesimpulan	21
	4.2 Saran dan rekomendasi kepada DPR	22
	4.3 Saran dan rekomendasi kepada pemerintah	22
<b>BAB V</b>	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada September 2000, Indonesia bersama dengan sedikitnya 189 negara lain, berkumpul di Markas PBB untuk menghadiri Pertemuan Puncak Millennium di New York. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk mendeklarasikan komitmen pembangunan millennium. Deklarasi tersebut berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai delapan buah sasaran pembangunan yang kemudian disebut sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs menjadi salah satu alat untuk tujuan terukur dalam hal pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Deklarasi tersebut juga merupakan komitmen dari pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang yang menderita karena kelaparan, menjamin kebutuhan dasar pendidikan untuk setiap anak, mengentaskan kesenjangan gender, mengurangi kematian Balita, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih. Kesemua tujuan millennium tersebut diharapkan tercapai pada 2015.

Adapun ke delapan poin MDGs tersebut adalah:

1. Pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
2. Pemerataan pendidikan dasar.
3. Persamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Pengurangan tingkat kematian anak.
5. Peningkatan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.
7. Menjamin daya dukung lingkungan.
8. Mengembangkan kemitraan global.

pencapaian MDGs di Indonesia masih memerlukan perjuangan secara menyeluruh dari berbagai komponen bangsa. Parlemen, dalam hal ini DPR RI, sesuai amanat konstitusi, dengan pelaksanaan fungsi-fungsinya yakni *legislasi, budgeting, controlling*, menjadi bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan pencapaian seluruh target dalam MDGs. Pada tanggal 11 Februari 2010, Rapat Pleno BKSAP telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja *Millennium Development Goals* (Panja MDGs) di lingkungan BKSAP yang anggotanya terdiri dari unsur Pimpinan dan anggota sesuai ketentuan dalam Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 7 dan sesuai UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pembentukan Panja MDGs tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para anggota Parlemen terkait isu-isu MDGs dan pencapaiannya. Sehingga, isu-isu MDGs dapat lebih mudah dicapai, melalui pelaksanaan fungsi DPR yakni *legislasi, budgeting*, dan kontrolnya. Selain itu, Panja juga berperan sebagai pintu depan diplomasi parlemen untuk menopang tugas pemerintah dalam mengembangkan kemitraan global.

Untuk menunjang kelancaran tugas dari Panja, maka, beberapa model kajian diperlukan untuk menentukan hal-hal yang diperlukan dalam mendorong seluruh anggota Parlemen untuk menyadari pentingnya isu-isu MDGs bagi pembangunan nasional. Salah satu model kajian yang dibutuhkan adalah melalui kunjungan lapangan. Hal ini menjadi salah satu basis model kajian yang dibutuhkan, mengingat Indonesia adalah negara besar, baik dari sisi geografis, maupun dari perkembangan demografi penduduk. Bentang wilayah Indonesia sepanjang 3.977 mil dengan sedikitnya 17.508 pulau dan 33 provinsi berpotensi menimbulkan perbedaan perkembangan pembangunan di masing-masing daerah.

Berdasarkan studi literatur awal, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan lapangan

Panja MDGs. Pemilihan NTT sebagai daerah tujuan kunjungan lapangan Panja MDGs tidak terlepas dari sejumlah data dan fakta yang menunjukkan masih rendahnya kemajuan pencapaian MDGs di wilayah tersebut. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional untuk NTT pada tahun 2009 adalah 31 dari 33. Jumlah penduduk miskin di NTT mencapai sekitar 23% dan lebih tinggi dari persentase nasional sekitar 13% pada 2010. Sementara kondisi angka kematian bayi dan lainnya juga menunjukkan perkembangan yang belum menggembirakan.

## 1.2. Dasar Kunjungan

Kunjungan Panja MDGs BKSAP DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan atas dasar:

1. Panja MDGs DPR RI memiliki tugas berdasarkan Pasal 76, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib berisikan bahwa BKSAP memiliki tugas *membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain*. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, BKSAP dapat melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional. Untuk menunjang data-data yang otentik, maka Panja MDGs DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke daerah bertujuan untuk menghimpun data-data yang terbaru untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah RI.
2. Hasil rapat internal Panja MDGs DPR RI, Surat No. 25/Bag. Set. OPI/IX/2010, Jakarta 20 Oktober 2010 telah memutuskan bahwa Panja MDGs DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Lapangan ke 2

(dua) daerah, yakni Kota Malang, Jawa Timur dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-16 Desember 2010.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Kunjungan Lapangan ini adalah:

- a. Mendapatkan informasi dan gambaran riil terkait pencapaian MDGs di daerah;
- b. Memperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai MDGs;
- c. Mengetahui gambaran kelemahan, maupun keunggulan daerah dalam upaya pembangunan untuk mencapai tujuan MDGs pada 2015 sehingga dapat merumuskan formula-formula lanjutan terkait upaya pembangunan dan pencapaian MDGs.
- d. Mendukung suksesnya pencapaian MDGs di Indonesia pada 2015

### **1.4. Susunan Delegasi**

Susunan delegasi Panja MDGs BKSAP DPR RI Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Dr M Hidayat Nur Wahid, MA : Ketua Delegasi (F-PKS)
2. Ir. H Azwar Abubakar, MM : Anggota Delegasi (F-PAN)
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo : Anggota Delegasi (F-PD)

## **BAB II**

### **PROFIL NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **2.1. Umum**

Nusa Tenggara Timur memiliki luas wilayah daratan sebesar 47.349,9 km<sup>2</sup> dan luas wilayah lautan mencapai 200.000 km<sup>2</sup>. Luas wilayah daratan tersebar pada 593 pulau, di mana 44 pulau berpenghuni dan 549 pulau tidak berpenghuni. Dari jumlah pulau yang ada, hanya 432 pulau yang sudah bernama. Secara administratif, Nusa Tenggara Timur ada tahun 2010 terdiri atas 20 Kabupaten, 1 Kota, 287 Kecamatan, 307 Kelurahan dan 2.560 desa. Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 mencapai 4.619.655 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 2.286.500 jiwa dan perempuan 2.333.155 jiwa.

Bila dilihat dari penyebarannya menurut kabupaten/kota, jumlah terbesar berada di Kabupaten Belu (10,09%), disusul Kabupaten Timur Tenggara Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang masing-masing sebesar 9,09% dan 8,53%. Sedangkan yang paling sedikit persentase penduduknya terhadap total penduduk NTT yaitu di Kabupaten Sumba Tengah (1,33%).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara ranking nasional, NTT menduduki urutan 31 dari 33 provinsi di Indonesia. Pada 2008, IPM NTT mencapai 66,1, sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013, daerah telah menetapkan sasaran pencapaian IPM sebesar 68,3.

Ukuran kemiskinan yang diukur melalui garis kemiskinan (jumlah konsumsi minimum), menunjukkan tren menurun. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2009 (Maret) mencapai 23,31%. Kondisi

tersebut menurun dari persentase tahun 2006 yang mencapai 29,34%. Sasaran RPJMD NTT adalah menurunkan proporsi penduduk miskin hingga 16,43% pada 2013.

Laju pertumbuhan ekonomi NTT cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Krisis ekonomi tahun 2005 membawa dampak menurun menjadi 3,42%, namun pada tahun berikutnya membaik dengan laju pertumbuhan di atas level 5% (2006 dan 2007). Pada tahun 2009 hingga triwulan III, ekonomi NTT bertumbuh sebesar 4,11% dengan target dalam RPJMD 5%-5,5%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT pada 2008 mencapai Rp 21,6 triliun. Penyumbang PDRB terbesar adalah pertanian yang mencapai 40% diikuti oleh sektor jasa yang mencapai 24% dan perdagangan (16%).

Angkatan kerja NTT terus meningkat, pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja NTT mencapai 2 juta lebih. Sementara angka pengangguran terbuka relatif rendah yakni di bawah 4, masih di bawah angka pengangguran terbuka nasional. Meski demikian, profil tenaga kerja NTT sangat rentan terhadap kondisi setengah pengangguran dan pengangguran terselubung. Mayoritas tenaga kerja di kabupaten bekerja di sektor pertanian yang mencapai 69,4%.



## **BAB III**

### **HASIL KUNJUNGAN**

#### **3.1. Pertemuan Dengan Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya di Kupang**

Pertemuan dengan Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya dilakukan di ruang kerja Gubernur, sekitar pukul 16.00 WITA pada Senin, 13 Desember 2010. Dalam kesempatan pertama, Gubernur merasa terhormat menerima kunjungan Panja MDGs BKSAP DPR RI di NTT.

Setelah acara perkenalan, Gubernur kemudian memaparkan berbagai kondisi pencapaian MDGs di NTT, dan sejumlah kebijakan yang akan diambil terkait upaya pencapaian tersebut. Dalam penjelasannya, isu-isu pembangunan daerah di NTT yang saat ini mengemuka dan terkait MDGs adalah proporsi penduduk miskin yang masih cukup tinggi, kendati menunjukkan penurunan. Berdasarkan survei terakhir 2010, penduduk miskin di NTT mencapai 23,03% dari jumlah penduduk menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 23,31% (2009).

Terkait pendidikan dasar untuk semua, Gubernur menjelaskan bahwa proporsi penduduk yang melanjutkan sekolah pada sekolah menengah pertama dan atas masih rendah, sementara proporsi penduduk buta huruf pada beberapa daerah masih tinggi. Selain itu, proporsi balita gizi buruk, angka kematian bayi, maupun angka kematian ibu masih tinggi. Sedangkan proporsi tenaga kesehatan di NTT masih rendah. NTT juga masih jauh dari rata-rata nasional dalam mengejar tingkat pendapatan perkapita penduduk.

Demi kebijakan tersebut, Pemprov NTT menetapkan visi pembangunan NTT yakni “Terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, adil, demokratis dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkannya, Pemprov NTT menetapkan target capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013 sebagai berikut: 1) Mencapai angka IPM 68,3; 2) Jumlah penduduk buta aksara tinggal 10.000 jiwa; 3) Angka Kematian Bayi mencapai 45/1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu 156/100.000 kelahiran hidup; 4) Menurunkan angka kemiskinan hingga 16,43%; 5) Mencapai pertumbuhan ekonomi 5,5% dan 6) Menciptakan iklim politik yang kondusif, *Good Governance* serta penegakan hukum dan HAM.

Untuk mempercepat pencapaian MDGs, Pemprov NTT mulai tahun 2011 menerapkan kebijakan Anggur Merah untuk pembangunan di desa. Anggur Merah merupakan akronim dari Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Menurut rencana masing-masing desa dikucuri dana segar untuk membangun daerahnya. Total alokasi yang dianggarkan untuk hal tersebut mencapai Rp 81,7 miliar. Pemprov NTT juga merencanakan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan mengembangkan jagung, ternak sapi, koperasi dan cendana. NTT sebelumnya sempat menjadi ikon cendana, tetapi populasi tanaman tersebut menurun akibat regulasi tata niaga cendana yang menyatakan seluruh kayu cendana adalah milik pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung dan menopang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diamanatkan oleh tujuan 1 MDGs.

Seusai paparan, anggota Delegasi Panja MDGs, KRMT Roy Suryo Notodiprojo, menanyakan mengapa angka kesehatan ibu (AKI) berdasarkan data persentase kelahiran dibantu tenaga khusus per

provinsi 2009 masih rendah hanya mencapai 49,9% (BPS, Susenas 2009), kendati ada perbaikan dalam upaya kesetaraan gender.

Anggota Delegasi Panja, Azwar Abubakar, juga menanyakan mengenai upaya tambahan percepatan akibat kebijakan amanat alokasi anggaran pendidikan 20% (UUD 1945 dan UU Sisdiknas). Selain itu, persoalan pengangguran yang hanya di bawah 4%, namun, kemiskinan masih mencapai 23% juga menjadi pertanyaan. Manfaat peternakan, serta masalah pengolahan laut juga menjadi pembahasan tersendiri dalam kesempatan tersebut.

Ketua Delegasi Hidayat Nur Wahid menanyakan mengenai upaya kerja sama yang telah dijalin antara NTT dengan lembaga-lembaga internasional/donor asing serta manfaat penyelenggaraan *event* bertaraf internasional di wilayah tersebut, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta potensi pariwisata yang belum menjadi target dalam upaya pengembangan kebijakan pembangunan yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Ketua Delegasi juga meminta penjelasan mengenai masih tingginya kasus HIV/AIDS di NTT yang secara kumulatif mencapai 221 (Desember 2008) kasus, sementara sekitar 50,6% masyarakat NTT telah memiliki sikap yang benar tentang pencegahan HIV/AIDS.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTT menerangkan dan berharap agar angka AKI semakin tinggi, seiring dengan survei terakhir yang masih dilakukan oleh pihak berwenang. Sementara terkait alokasi anggaran pendidikan, Gubernur menjelaskan porsi anggaran daerah sekitar 50% lebih digunakan untuk belanja pegawai, namun demikian alokasi pendidikan terus diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk masalah pengangguran, NTT juga memiliki pengangguran terselubung yang tinggi. Artinya banyak masyarakat yang bekerja

tetapi tidak mendapatkan penghasilan. Gambaran masyarakat adalah bekerja itu hanya untuk mencukupi sandang dan papan. Masalah peternakan, NTT telah berencana untuk mengembalikan daerah tersebut sebagai daerah ternak mengingat wilayah Sumba dan Flores pernah menjadi daerah unggulan untuk ternak sapi dan kuda. NTT juga masih menghadapi sejumlah kendala terkait maksimalisasi sumber daya alam (SDA) laut. Selain kultur masyarakat yang bukan bahari tetapi agraris, kewenangan kelautan di wilayah NTT mayoritas menjadi urusan pemerintah pusat. Namun demikian, NTT telah mengampanyekan Gerakan Masuk Laut (Gemala) agar masyarakat perlahan-lahan dapat menyadari potensi laut dan memaksimalkannya.

Secara khusus Gubernur NTT menyampaikan aspirasi dan permohonan dukungan kepada Panja terkait status Provinsi Kepulauan untuk NTT. Dengan adanya status tersebut, Gubernur mengharapkan agar darat dan laut di NTT menjadi satu kesatuan wilayah dan dapat diolah semaksimal mungkin bagi NTT untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai upaya percepatan tujuan MDGs, khususnya tujuan ke-8 yakni menjalin kemitraan global, Gubernur juga secara aktif mendatangi lembaga-lembaga internasional seperti PBB untuk memperoleh dukungan kemitraan, dengan catatan tidak membawa program baru di NTT. Sementara dampak dari *event* internasional yang digelar di NTT adalah banyak lembaga kemitraan internasional yang berdatangan dan memberikan dukungan seperti World Food Programme (WFP) maupun UN Joint Programme.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi cukup bagus, namun demikian, kondisi harmonis kadang sulit terjadi di wilayah kabupaten/kota. Sementara terkait penanganan HIV/AIDS, NTT juga menggandeng sejumlah lembaga internasional seperti Global

Fund, Ausaid untuk kampanye HIV/AIDS di daerah-daerah. Selain itu, NTT juga telah membentuk lembaga sendiri untuk menangani peredaran narkotika dan obat-obatan (Narkoba).

Terkait potensi pariwisata, Gubernur NTT mengakui bahwa hal tersebut tidak secara eksplisit menjadi tekad, namun pihaknya terus menerus mendorong potensi tersebut untuk berkembang. Beberapa kebijakan penopang diantaranya adalah rencana menggelar acara tahunan "Sail Komodo" untuk meningkatkan pariwisata di NTT, rencana pengembangan taman laut di Alor, maksimalisasi potensi obyek danau tiga warna, dan batu megalitikum di Sumba, serta pembukaan pintu wisata lewat Flores untuk menarik wisatawan yang singgah di Bali. Flores juga tengah bekerjasama dengan Swiss Contact untuk mengembangkan pariwisata di wilayah terkait.

Pada kesempatan itu diberikan pula kenang-kenangan dari Delegasi Panja MDGs DPR RI kepada Pemprov NTT berupa cinderamata.

### **3.2. Pertemuan Dengan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki di Rumah Jabatan Bupati Kupang.**

Pertemuan dengan Bupati Kubang, Ayub Titu Eki dilakukan di ruang jabatan Bupati Kupang, sekitar pukul 09.30 WITA pada Selasa, 14 Desember 2010. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Delegasi Panja MDGs DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan tujuan kunjungan Panja ke NTT adalah untuk melihat lebih dekat, dan memantau dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya percepatan pencapaian MDGs di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, menyampaikan beberapa paparannya terkait pencapaian MDGs di Kabupaten Kupang. Bupati menegaskan pihaknya memiliki kebijakan

untuk mempercepat pencapaian target MDGs menjadi tahun 2013 dari target global pada tahun 2015. Bupati menerangkan mengenai kebijakan pendidikan di Kupang yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik. Perluasan akses pendidikan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian MDGs goal 2 (pendidikan dasar untuk semua) dilakukan bukan dengan menambah fasilitas pendidikan karena keterbatasan anggaran, tetapi lebih kepada pemberdayaan tenaga pendidik. Guru-guru jemput bola mendatangi siswa di wilayah pelosok, dengan manajemen jam mengajar yang disesuaikan sedemikian rupa.

Sementara terkait urusan peternakan yang potensial untuk mendukung pencapaian target MDGs no 1 (pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem), Kabupaten Kupang mengalami kendala pada pakan ternak. Lahan peternakan yang luas, dan jumlah ternak dinilai bukan menjadi masalah. Bupati Kupang menyampaikan aspirasi bahwa hingga saat ini pakan ternak didatangkan dari Surabaya dan Bali, sementara NTT sebenarnya memiliki potensi besar untuk bahan baku pakan ternak.

### **3.3. Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Tenau, NTT**

Dalam kunjungannya ke NTT, Panja MDGs DPR RI berkesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan secara singkat ke Pelabuhan Tenau, NTT. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan sekitar pukul 10.30 WITA. Kunjungan dilakukan ke Pelabuhan Tenau untuk melihat sejauh mana wilayah pelabuhan dapat menjadi penopang perkembangan pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada pencapaian MDGs khususnya goal 1 (pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem).

Berdasarkan profil data Pelabuhan Tenau, NTT, pelabuhan tersebut mulai dibangun pada tahun 1964 dengan jarak kurang lebih 8 km selatan Kota Kupang. Pelabuhan Tenau saat ini dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan luas wilayah daratan 41,45 hektare (Ha). Dalam daerah daratan tersebut terdapat Dermaga Khusus dan Pelabuhan Khusus sebagai berikut: Dermaga Khusus Pertamina, Pelabuhan Khusus Perikanan, Pelabuhan Khusus Penyeberangan, Pelabuhan Tenau (Dermaga antarpulau Nusantara, Dermaga Lokal/Dermaga Kapal Penumpang, Dermaga Pelra, Dermaga Serba Guna), Pelabuhan Rakyat Namosain.

Potensi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste serta berada pada persimpangan alur pelayaran internasional yang menghubungkan pelabuhan utama di benua Australia dengan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara maupun Asia Timur membuat Pelabuhan Tenau memiliki posisi yang strategis. Ke depan, berdasarkan rencana pengembangan transportasi laut Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tenau ditetapkan menjadi kawasan hub-port untuk Kawasan Timur Indonesia. Ke depan, Pelabuhan Tenau berpotensi menjadi pemicu dan pendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan industri di Pulau Timor khususnya dan NTT pada umumnya.

### 3.4. Kajian MDGs di NTT

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, berikut dipaparkan hal-hal, kebijakan, dan hambatan pemerintah provinsi (Pemprov) NTT dalam pencapaian MDGs melalui tabel berikut:

<b>Goals</b>	<b>Upaya/kebijakan</b>	<b>Capaian</b>	<b>Hambatan</b>
1. Pengentasan kemiskinan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2011, menggulirkan dana total Rp 81,7 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009→kemiskinan 23,31%; Indeks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi geografis berbukit-bukit dan terpisah lautan,</li> </ul>

kelaparan ekstrem	<p>untuk seluruh desa/kelurahan di NTT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009, anggaran <i>Pro-poor</i>: Rp 283,5 M, 2010 meningkat 10%.</li> <li>▪ Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui empat tekad: Pengembangan jagung, ternak sapi, koperasi dan cendana</li> <li>▪ Maksimalisasi potensi laut melalui Gemala (Gerakan Masuk Laut)</li> <li>▪ Mendorong pengembangan potensi pariwisata di NTT</li> <li>▪ Target capaian kinerja RPJMD 2009-2013 adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jadi 68,3; Kemiskinan turun jadi 16,43%, dan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5%.</li> </ul>	<p>kedalaman kemiskinan 4,14; Indeks Keparahan Kemiskinan 1,14.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008→ Balita gizi buruk: 9,4%. Balita gizi kurang: 24,2%.</li> </ul>	<p>menyulitkan koordinasi antarpemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disparitas capaian pengentasan kemiskinan antardaerah kabupaten/kota cukup tinggi</li> <li>▪ Kultur masyarakat masih kental dengan upacara adat. Biaya hidup lebih banyak terserap untuk upacara adat daripada kebutuhan hidup harian.</li> <li>▪ Potensi pariwisata belum masuk dalam kebijakan tekad Pemprov NTT untuk ekonomi rakyat.</li> <li>▪ Sulitnya Pemprov NTT mengelola SDA khususnya laut karena terhambat urusan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>▪ Masih adanya jajaran birokrasi ataupun elemen masyarakat yang belum mengetahui MDGs.</li> </ul>
2. Pendidikan dasar untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan penyelenggaraan Wajib Belajar</li> <li>▪ Pemberian beasiswa sejak 2009. Pada 2011 beasiswa untuk 21.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008→</li> <li>▪ APM sekolah dasar mencapai 96,27%.</li> <li>▪ APM SMP (13-15 tahun): 87,34%.</li> <li>▪ Angka melek huruf usia 15-24 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realisasi anggaran pendidikan masih jauh dari amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mewajibkan</li> </ul>



	<p>siswa SMP, 16.000 siswa SMK dan 11.000 siswa SMK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Sarpras di perkotaan &amp; perdesaan</li> <li>▪ Tenaga pendidik jemput bola ke daerah pelosok.</li> <li>▪ 2010 alokasi anggaran pendidikan di Provinsi NTT baru sekitar 10% dari APBD.</li> <li>▪ Target capaian kinerja RPJMD 2009-2013: IPM 68,3; Buta aksara tinggal 10.000 orang.</li> </ul>	<p>88,57% dan sisanya 11,43% adalah masyarakat yang belum/tidak dapat membaca</p>	<p>alokasi 20% dari APBN/APBD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih minimnya beasiswa untuk memenuhi pendidikan dasar</li> <li>▪ Jarak antara rumah dengan sekolah relatif jauh dengan kontur berbukit dan kepulauan</li> <li>▪ Kualifikasi guru masih rendah, karena mayoritas masih belum berijazah S1.</li> <li>▪ Bentuk provinsi kepulauan juga berpengaruh terhadap motivasi guru dalam mengajar</li> </ul>
<p>3. Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota</li> <li>▪ Koordinasi dan penguatan pengarusutamaan gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2009→</li> <li>▪ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan: 60,46% (961.585 orang)</li> <li>▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan: 5,48% (52.730 orang).</li> <li>▪ Proporsi keterwakilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum maksimalnya program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam pemberian bekal pendidikan dan keterampilan termasuk bahasa asing kepada para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di</li> </ul>

		<p>perempuan pada DPRD NTT:7,27% (2009-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rata-rata keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota mencapai 7,74%.</li> <li>▪ Keterwakilan 50% dicapai dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencapai 2 dari 4 anggota.</li> </ul>	<p>luar negeri.</p>
<p>4. Menurunkan angka kematian anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan</li> <li>▪ Menambah keberadaan tenaga kesehatan dengan bekerjasama bersama Perguruan Tinggi (PT) seperti Universitas Cendrawasih untuk pendirian Fakultas Kedokteran</li> <li>▪ Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat via UKBM seperti Posyandu, UKS dan Desa Siaga.</li> <li>▪ Peningkatan pelayanan KB</li> <li>▪ Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 57 per 1.000 kelahiran hidup (2007)</li> <li>▪ Angka Kematian Balita (AKBA) mencapai 80 per 1.000 kelahiran hidup (2007)</li> <li>▪ Persentase imunisasi campak mencapai 78,1%.</li> </ul>	<p>Kurangnya tenaga kesehatan berupa dokter. Berdasarkan data paparan Gubernur NTT terkait MDGs, jumlah dokter di NTT masih jauh di bawah Standar Nasional Indonesia Sehat 2010 yang mencapai 40/100.000 penduduk.</p>

<p>5. Meningkatkan kesehatan ibu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>▪ Peningkatan upaya promosi kesehatan</li> <li>▪ Meningkatkan akses masyarakat atas layanan kesehatan</li> <li>▪ Mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin</li> <li>▪ Pemenuhan tenaga kesehatan secara bertahap</li> </ul>	<p>Hasil Riskesda 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan mencapai 306 per 100.000 kelahiran hidup dan sebanyak 79,1% ibu hamil telah ditolong oleh tenaga kesehatan</li> </ul>	<p>Jumlah bidan di NTT berdasarkan data paparan Gubernur NTT terkait MDGs masih jauh di bawah standar. Standar Nasional Indonesia Sehat 2010 adalah 100/100.000 penduduk.</p>
<p>6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bekerjasama dengan lembaga mitra/LSM/donor internasional untuk kampanye HIV/AIDS hingga ke daerah-daerah</li> <li>▪ Membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba di tingkat provinsi NTT</li> <li>▪ Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan &amp; peningkatan jumlah Sarpras kesehatan</li> </ul>	<p>Desember 2009→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah kasus HIV/AIDS: 549 kasus (HIV) dan 404 kasus (AIDS)</li> <li>▪ Total penderita 953 orang. Sebanyak 252 orang dari jumlah tersebut telah meninggal dunia.</li> <li>▪ Terkait penyakit menular lainnya, jumlah kasus malaria di NTT sebanyak 482.333 dengan Annual Malaria Indeks (AMI) 106%. Angka penemuan penderita Tuberkulosis adalah 37% dengan</li> </ul>	<p>Proporsi penduduk yang pernah mendengar, berpengetahuan benar dan bersikap benar di NTT (Riskedas 2007) cukup tinggi (50,6% bersikap benar tentang pencegahan HIV/AIDS) namun tren kasus HIV/AIDS masih tinggi.</p>

		keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis mencapai 85%.	
7. Meningkatkan daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mencegah konversi lahan pertanian produktif</li> <li>▪ Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan</li> <li>▪ Mempertahankan areal lahan hutan</li> <li>▪ Peningkatan konservasi air dan Sarpras-nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008→</li> <li>▪ Rasio luas kawasan tertutup pepohonan: 43,48%</li> <li>▪ Rasio luas hutan di NTT terhadap daratan: 3,78%</li> <li>▪ Rasio kawasan lindung terhadap daratan adalah 14,67%</li> <li>▪ Rasio kawasan hutan produksi terhadap luas daratan adalah 6,58%</li> <li>▪ Rasio kawasan hutan produksi konservasi terhadap luas daratan sebesar 2,32%</li> <li>▪ Rasio kawasan hutan produksi terbatas terhadap luas daratan sebesar 4,9%.</li> <li>▪ Akses penduduk terhadap air bersih 46,28% (menggunakan mata air), 27,61%</li> </ul>	Belum diperoleh penjelasan mengenai upaya konservasi SDA yang menjadi ciri khas Provinsi Kepulauan, yakni laut

		<p>(sumur), 15,54% (PAM), 5,14% (sungai), 1,46% (pompa air). jumlah penduduk yang memiliki jamban sehat sebanyak 45,8%, tempat sampah 32,6% dan pengolahan air limbah sebanyak 32,8%.</p>	
8. Mengembangkan kemitraan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjalin kemitraan global dengan lembaga-lembaga internasional seperti WFP (Pangan), Swiss Contact (Pariwisata), UN Joint Programme (Program-program pemberdayaan di kawasan perbatasan) dan lainnya untuk mendukung program-program yang telah ada di NTT</li> <li>▪ Menciptakan sistem pelayanan satu atap untuk proses pengiriman tenaga kerja ke luar daerah</li> <li>▪ Perbaiki dan penataan mekanisme pengiriman tenaga kerja ke luar daerah dan luar negeri</li> <li>▪ Menciptakan iklim usaha yang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2008→</li> <li>▪ jumlah angkatan kerja NTT mencapai 2 juta lebih.</li> <li>▪ Angka pengangguran terbuka relatif rendah yakni di bawah 4, masih di bawah angka pengangguran terbuka nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya lembaga mitra yang membawa program baru, dengan tidak mengadaptasinya sesuai potensi lokal NTT</li> <li>▪ Potensi masalah bisa berkembang mengingat NTT berbatasan darat langsung dengan Timor Leste maupun berbatasan laut dengan Australia</li> </ul>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kunjungan Panja MDGs DPR RI ke NTT dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum komitmen MDGs telah diketahui oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di NTT. Sebagian besar kebijakan telah mengarah kepada upaya pencapaian MDGs. Namun demikian, masih ada jajaran birokrasi yang menghadapi kendala dalam menerjemahkan upaya pencapaian MDGs ke dalam kebijakan daerah atau dalam implementasinya di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Topografi wilayah yang berbukit-bukit dan kepulauan serta kultur masyarakat, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pencapaian MDGs di NTT.
- c. Perlunya mensinergikan kebijakan lokal baik dalam hal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian MDGs.
- d. Pemerintah daerah NTT masih terus berupaya agar target MDGs dapat dicapai pada tahun 2015. Namun demikian, masih ada kendala dalam masalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mengurangi kematian ibu, dan angka kematian anak, dan peningkatan daya dukung lingkungan.
- e. Perlu perhatian lebih serius terkait program-program kemitraan global terutama yang menggandeng lembaga internasional mengingat NTT merupakan daerah yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga yakni Timor Leste ataupun berbatasan laut dengan Australia.

- f. Dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya perlu dimaksimalkan demi mendukung upaya percepatan pencapaian MDGs.

#### **4.1. Saran dan Rekomendasi Kepada DPR**

- a. DPR RI melalui Panja MDGs dapat terus memaksimalkan fungsinya dalam memberikan dukungan untuk upaya pencapaian MDGs terutama di daerah. Prioritas lebih juga diperlukan terhadap capaian MDGs yang masih rendah.
- b. Sosialisasi tentang MDGs perlu lebih digencarkan di kalangan Parlemen agar terwujud dukungan yang lebih konkret dalam pencapaian MDGs di Indonesia melalui fungsi parlemen dalam bidang legislasi, budgeting dan monitoring. Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan asimilasi MDGs melalui cita-cita ideologi bangsa, maupun landasan konstitusi UUD 1945.
- c. Secara khusus DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi Pemerintah Provinsi NTT terkait status Provinsi Kepulauan dengan memberikan fokus prioritas untuk proses pembahasan RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan ataupun RUU tentang Perubahan UU Pemerintahan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2011.

#### **4.1. Saran dan Rekomendasi Kepada Pemerintah**

- a. Pemerintah diminta untuk terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian MDGs dengan memadukan dan tidak melupakan kaidah keistimewaan, kekhususan, maupun potensi lokal baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) dari masing-masing daerah.
- b. Pemerintah pusat hendaknya mempercepat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs untuk

meminimalisir disparitas pencapaian MDGs yang terjadi di masing-masing daerah.

- c. Skema kemitraan *public private partnership* perlu dikembangkan secara maksimal dalam mendukung upaya pencapaian MDGs pada 2015 dengan fokus kepada daerah-daerah yang masih perlu mendapatkan prioritas penanganan MDGs.
- d. Pemerintah perlu menciptakan skema insentif baik fiskal maupun penghargaan bagi daerah yang dipandang sukses dalam mencapai MDGs, agar kompetisi pencapaian MDGs dapat terjadi di daerah.
- e. Sosialisasi dan kampanye menyeluruh mengenai kesadaran MDGs perlu dilakukan untuk menyebarluaskan komitmen MDGs hingga ke level terbawah.

Demikianlah laporan Kunjungan Lapangan Panja MDGs DPR-RI ke Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-14 Desember 2010 ini disampaikan dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 23 Desember 2010

Ketua Tim Kunjungan Lapangan  
Delegasi Panja MDGs DPR RI ke Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
**Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA**

**BAB V**



## LAMPIRAN



PANJA MDGs —Ketua tim kunjungan Panja MDGs di NTT, Hidayat Nur Wahid, menyerahkan cinderamata kepada Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, di ruang kerjanya, Senin (13/12/2010).

# DPR Dorong Percepatan MDGs di NTT

KUPANG, PK —Ketua Tim Kunjungan Panitia Kerja (Panja) MDGs BKSAP, Hidayat Nur Wahid, mendorong Pemerintah Propinsi NTT mempercepat pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium.

Nur Wahid mengatakan itu saat bertatap muka dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, di ruang kerja gubernur, Senin (13/12/2010). Menurut Nur Wahid, MDGs dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi pada tahun 2015, dan telah tercantum pada Deklarasi Millenium yang telah ditandatangani 189 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada tahun 2000 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil dari Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia (*World Summit*) pada tahun 2005.

Tujuan dari MDGs, katanya, ialah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,

mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dia mengatakan DPR bersama pemerintah sangat mendukung program ini agar dapat segera tercapai. Untuk itu Panja MDGs mengunjungi semua propinsi untuk menyamakan persepsi dan menceritakan seperti apa komitmen pemerintah melaksanakan MDGs di daerah.

Target yang ingin dicapai oleh Panitia Kerja MDGs, kata Nur Wahid, adalah untuk meningkatkan peran serta anggota DPR dalam pembuatan regulasi untuk percepatan pencapaian

MDGs, meningkatkan kapasitas DPR dalam pengawasan pencapaian MDGs, mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada pencapaian MDGs, meningkatkan kerja sama antarpemerintah dengan organisasi-organisasi internasional dalam berbagai informasi dan pengetahuan tentang pencapaian MDGs, menjadi *Focal Point* DPR untuk MDGs dan mendorong pemerintah dan para *stakeholders* untuk percepatan pencapaian MDGs tahun 2015.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, memaparkan berbagai potensi, visi dan misi serta program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam mendukung percepatan MDGs. Lebu Raya menyebutkan program pengentasan kemiskinan dengan Desa Mandiri Anggur Merah, program kesehatan ibu dan anak dengan Revolusi KIA, peningkatan SDM dengan

peningkatan dana APBD untuk bidang pendidikan, walau belum sesuai amanat UU, 20 persen.

Gubernur menjelaskan, untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Propinsi NTT mencanangkan empat tekad, yakni propinsi jagung, temak, koperasi dan cendana. NTT juga memiliki potensi pariwisata, potensi kelautan dan perikanan yang bisa dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat.

Gubernur menaruh harapan agar Panja MDGs memberikan atensi terhadap perjuangan mendapatkan pengakuan NTT sebagai propinsi kepulauan. Terhadap permohonan itu, Nur Wahid yang didampingi Ir. H. Azwar Abubakar dan Roy Suryo Notodiprjo berjanji akan membicarakan itu dengan komisi yang membicarakan perundang-undangan agar NTT mendapat pengakuan sebagai propinsi kepulauan. (gem)



Rapat Konsultasi Delegasi Panja MDGs DPR RI dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di Ruang Kerja Gubernur



Jamuan Makan Malam oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di Rumah Jabatan Gubernur. Jamuan tersebut juga dihadiri oleh Delegasi Sosialisasi MPR RI dan DIRJEN Ciptakarya, Kementerian Pekerjaan Umum



Situasi Jamuan Makan Malam di Rumah Jabatan Gubernur NTT



Ketua Delegasi Panja MDGs, DR. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA sedang memberikan Pidato untuk mengajak seluruh elemen pemerintahan di NTT dalam percepatan pencapaian MDGs tahun 2015



Pertemuan Delegasi Panja MDGs dengan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki di Rumah Jabatan



Delegasi Panja MDGs foto bersama dengan Jajaran Bappeda dan Pemprov NTT yang telah membantu melancarkan Kunjungan Lapangan Panja MDGs ke Kupang, 13-14 Desember 2010